BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timor-Leste menghadapi berbagai konflik sejak awal integrasinya. Tahap integrasi Timor-Leste masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1975 sampai 1999 berlangsung dalam situasi yang penuh kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Catherine & Close, 2016). Penyerangan militer Indonesia melalui Operasi Seroja pada 7 Desember 1975 bermaksud atau bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut, yang setelah itu secara resmi ditetapkan provinsi ke-27 pada 17 Juli 1976 (Nursyifa & Widodo, 1999). Integrasi ini memperoleh perlawanan keras kelompok pro-kemerdekaan, khususnya FRETILIN yang menentukan strategi perlaawanan bersenjata melalui perang gerilya di daerah pegunungan Timor-Leste.

Pemerintah Indonesia menanggapi dengan kampanye militer berskala besar, khususnya antara tahun 1977-1979 yang mengakibatkan ribuan korban jiwa di kalangan warga sipil dan memicu pengungsian massal serta krisis pangan akibat dampak blokade terhadap distribusi dan hancurnya mata pencaharian (Taylor, 2009). Masuk pada 1980-an, pendekatan penindasan diperkuat melalui penerapan kontrol militer yang ketat di wilayah terpencil dengan menempatkan aparat Koramil dan Babinsa di setiap desa supaya mudah mengontrol, disertai praktik penahanan semuanya, penyiksaan, kekerasan seksual, dan intimidasi terhadap masyarakat yang mendukung gerakan kemerdekaan Timor-Leste (Silva & Ball, 2006).

Peristiwa Santa Cruz pada 12 November 1991 menjadi tragedi yang sangat menarik perhatian negara-negara maju untuk melihat tragedi tersebut. Waktu itu, tentara Indonesia menewaskan ribuan oang Timor-Leste yang sedang melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz, Dili (Alessandro Kurniawan Ulung, 2023). Sekitar 271 orang meninggal dan ratusan orang lainnya mengalami luka dan ada yang hilang. Tragedi tersebut direkam oleh jurnalis asing dan membuat dunia Internasional mengecam tindakan tersebut (Kiernan, 2007).

Presiden B.J. Habibie memberikan opsi bagi masyarakat Timor-Leste untuk menetukan nasib mereka melalui referendum pada tahun 1999. Hasil dari referendum yang dilakukan oleh masyarakat Timor-Leste sebagian besar memilih untuk menentukan nasib merdeka dengan total 78,5% (Kusuma, 2017). Tetapi, setalah diumumkan hasil referendum masyarakat yang militer Indonesia dan masyarakat pro-Indonesia melakukan kekerasan kepada masyarakat yang pro kemerdekaan. Warga Timor-Leste dibunuh, rumah dibakar, serta 250.000 orang dipaksa untuk mengungsi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) (Robinson, 2003). Menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor* atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), lebih dari 100.000 orang meninggal selama masa penjajahan Indonesia, baik dari kekerasan langsung maupun kondisi hidup atau ekonomi yang sangat buruk akibat konflik yang terjadi di tengah masyarakat Timor-Leste (Silva & Ball, 2006). Konflik tersebut menjadi bagian kelam dalam sejarah hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste, sejarah ini menjadi pengingat penting akan pentingnya perlindungan HAM di Asia Tenggara. Kondisi ini mendorong perlu adanya *Soft Diplomacy* yang terbuka dan melibatkan masyarakat untuk menghilangkan bekas HAM yang terjadi di tengah masyarakat.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste, masih terdapat beberapa persoalan atau tantangan yang menjadi prioritas, walaupun secara keseluruhan hubungan antara kedua negera tersebut telah menunjukkan kemajuan yang baik sejak Timor-Leste menjadi suatu negara pada pada 20 Mei 2002 (Silva & Ball, 2006). Persoalan yang belum diselesaikan antara kedua negara tersebut merupakan masalah perbatasan darat dan laut. Beberapa titik perbatasan di Timor-Leste bagian barat Oe-cusse dan wilayah Indonesia bagian Timur NTT, seperti *Noel Besi Citrana dan Bijael Sunan Oben* masih menjadi persoalan akibat perbedaan penafsiran dokumen peninggalan kolonial Portugis dan Belanda yang digunakan sebagai acuan dalam proses penetapan titik batas darat dan laut (East et al., n.d.).

Perlindungan warga negara menjadi tantangan oleh kedua negara tersebut yang di mana keberadaan pengungsi asal Timor-Leste yang saat ini masih tinggal di Indonesia dan warga negara Indonesia yang menetap di Timor-Leste tanpa dokumen resmi dan status kewarnegaraan mereka juga belum jelas dua hal tersebut perlu adanya solusi diplomatik lintas negara agar bisa menyelesaikan persoalan status kewarganeraan mereka (Damaledo, 2018).

Persoalan yang masih membekas pada kedua warga negara tersebut merupakan persoalan psikologis atau trauma terhadap sejarah yang ditinggalkan oleh militer Indonesia dan masyarakat pro-Indonesia terkait pelanggaran HAM menjelang referendum pada tahun 1999. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dibentuk sebagai mekanisme untuk melakukan rekonsiliasi antara kedua negera tersebut yang fokus pada stabilitas politik dan tuntutan dari para korban (Rüland & Manea, 2010). Tetapi adanya perselisihan pendapat terkait narasi sejarah sebagai hambatan kepercayaan yang berkelanjutan. Indonesia dan Timor-Leste harus memprioritaskan aspek identitas, memori kolektif dan kebutuhan sosial masyarakat di perbatasan (Leach, 2009).

Diplomasi menjadi birokrasi atau administrasi publik dari suatu negara di negara lain untuk melakukan kepentingan dari negeranya di luar negeri dan menyelesaikan isu-isu global. Tetapi sering menghadapi transformasi di abad ke-21 terkait ketidakstabilan dalam aturan global tentang kemajuan teknologi komunikasi digital dan tantangan terhadap legalitas pemerintah liberal yang mendorong kebijakan luar negeri (Hocking, 2020).

Birokrasi diplomatik memiliki peran strategis juga mempengaruhi pribadi mereka, yang di mana proses negosiasi terjadi secara formal, tetapi bergantung pada komunikasi informal menjadi hambatan interaksi, kebutuhan kerahasiaan tentang kebijaksanaan dalam mencapai efektivitas diplomatik. Dipmolas saat ini meluas ke berbagai sektor tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Keberagaman ini dilihat dari perluasan kerja dalam struktur diplomasi tentang isu-isu multilateral tradisional yang menjadi pelaksanaan diplomasi moderen atau *New Diplomacy* (Turner, 2014).

Diplomasi publik mjadi bagian penting bagi negara untuk menunjukkan pendekatannya secara halus (*soft power*) untuk membangun citra yang baik dan membangun kerja sama dengan negara lain. Dengan pendekatan *soft power* negara mampu membangun hubungan yeng melekat dengan masyarakat dunia tanpa kekuatan militer atau tekanan politik dan ekonomi (Saaida, 2023). Menurut Joseph Nye (2023), *Soft Diplomacy* sebagai pendekatan yang mengandalkan daya tarik dan pendekatan persuasif untuk mempengaruhi negara lain. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan budaya, program pendidikan dan nilai-nilai yang umum dan kebijakan yang menarik dan membentuk persepsi masyarakat internasional. Indonesia telah menerapkan pendekatan *soft diplomacy* sebagai alat atau instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Timor-Leste (Bernadette, 2022).

Kritik terkait diplomasi saat ini masih menyoroti tentang ketimpangan pendekatan klasik yang tertutup, elistis dan keras secara birokratis terkait keterbukaan dan keterlibatan publik. Praktik diplomasi masih menghadapi tantangan dalam menanggapi perubahan global terutama isu-isu transnasional krisis iklim, perpindahan penduduk, krisis kesehatan dan ancaman siber (Fitzpatrick, 2007). Di negara-negara maju dalam proses diplomasi dipandang masih mengesampingkan suara negera bemkembang dan aktor non negara. Diplomasi perlu mengadopsi pendekatan yang transparan, fleksibel dan kolaboratif (Sevin, 2025).

Komunikasi sebagai proses dinamis dalam membangun makna melalui pertukaran informasi antara individu maupun kelompok. Proses tersebut merangkum penggunaan simbol dan pesan yang ditafsirkan dalam struktur sosial dan budaya tertentu (West & Turner 2018). Komunikasi tidak sekadar menyampaikan pesan, melainkan menciptakan atau membangun hubungan dan memungkinkan terjadinya pengaruh timbal balik antar partisipan (Kent & Taylor, 2021).

Komunikasi merupakan aktivitas sosial yang membentuk realitas melalui bahasa atau simbol yang disepakati secara kebersamaan. Perspektif ini menerangi peran aktif komunikasi dalam proses konstruksi makna di tengah

masyarakat (Craig, 2018). Degan adanya perkembangan teknologi, komunikasi berkembang ke ranah digital, komunikasi digital memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut partisipasi terkait isu global (Minh et al., n.d.). Komunukasi juga berperan penting dalam ranah diplomasi untuk menyampaikan pesan diplomasi dengan baik dan mudah dipahami.

Diplomasi dan komunikasi saling membutuhkan untuk mengkomunikasikan kepentingan, program atau tujuan dari kedutaan di negara lain. Diplomasi perlu memadukan kemampuan komunikasi yang bersifat strategis dan wawasan yang kuat tentang budaya, dinamika politik dan menciptakan narasi yang meyakinkan publik dan mempengaruhi pandangan nasyrakat global di negara lain (Jönsson & Hall, 2003). Penerapan diplomasi pada dasarnya ditinjau dari perspektif politik dan studi Hubungan Internasional (HI). Diplomasi juga sebagai bentuk komunikasi antar negara yang melibatkan berbagai aktor dan saluran media di era disruptif ini, keberhasilan diplomasi bergantung pada kemampuan dalam mengatur komunikasi yang strategis, pendidkan juga sebagai bentuk soft diplomasi (Lusa, 2024).

Sepanjang tahun 2022-2025, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili tercatat telah menyalurkan total 1.700 beasiswa pendidikan kepada masyarakat Timor-Leste sebagai bagian dari penguatan kerja sama pendidikan antara kedua negara. Dari total tersebut, beasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mendominasi dengan 1.389 penerima atau sekitar 81,7% dari kesuluruhan penerima beasiswa. Sementara itu, beasiswa *The Indonesian Aid Scholarship* (TIAS) diberikan kepada 70 penerima atau 4,1% Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebanyak 42 penerima atau 2,5% dan Beasiswa Darmasiswa sebanyak 10 penerima atau 0,6%. Data tersebut menujukkan bahwa program pendidikan tersebut belum memiliki jangkauan yang cukup luas.

Program pendidikan merupakan suatu instrumen atau alat dalam diplomasi publik untuk memperat hubungan bilateral atau kerja sama antar kedua negara melalui pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa di negara tersebut, pendekatan tersebut memberi dampak yang positif dan berkelanjutan (Gauttam

et al., 2024). Dari program pendidikan tersebut tebukti bahwa telah membangun hubungan kerja sama yang baik dari kedua negara.

Hubungan antara Indonesia dan Timor-Leste mempunyai sejarah yang begitu kompleks terkait konflik yang terjadi di tengah masyarakat Timor-Leste paskah referendum pada tahun 1999 sebagai *hard diplomacy* (Kalembang & Korbaffo, 2005). Hubungan Indonesia dan Timor-Leste sebelumnya menjadi *hard diplomacy* karena Timor-Leste ingin merdeka dari Indonesia. Setelah Timor-Leste merdeka kedua negara tersebut menjalin hubungan *soft diplomacy* melalui program dari KBRI seperti pertukaran budaya, pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa oleh pemerintah Indonesia sebagai alat atau instrumen dan strategis untuk memperat hubungan bilateral dan kerja sama yang berkelanjutan (Bernadette et al., 2022).

Namun dalam proses implementasi program pendidikan yang dilakukan oleh KBRI Dili untuk masyarakat Timor-Leste masih menghadapi berbagai tantangan penyebaran informasi terkait program tersebut salah satu yang mempengaruhi strategi komunikasi diplomatik KBRI dengan beberapa problematika yang dihadapi sebagai hambatan akses informasi, masalah bahasa dan pendekatan jejaring dengan alumni.

Hambatan terkait akses informasi menjadi suatu kendala utama oleh masyarakat Timor-Leste, calon mahasiswa dan tenaga pendidik tentang program pendidikan yang diberikan oleh KBRI. Kurangnya penyebaran informasi terkait program pendidikan akan menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Timor-Leste dalam program pendidikan (Sacramento et al., 2024). Hambatan tentang bahasa pula menjadi suatu tantangan yang signifikan dalam komunikasi diplomatik KBRI yang di mana bahasa Indonesia bukan bahasa uatama Timor-Leste, sehingga sebagian masyarakat Timor-Leste masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi program pendidikan yang diberikan oleh KBRI Dili (Sacramento et al., 2024). Oleh karena itu penyampaian informasi terkait program pendidikan harus menggunakan bahasa utama Timor-Leste.

Kurangnya hubungan antara KBRI dan alumni penerima beasiswa dari KBRI juga menjadi salah faktor dalam memperkuat keberlanjutan kerja sama Indonesia dan Timor-Leste. Alumni penerima beasiswa dari KBRI Dili memiliki potensi sebagai duta informasi yang dapat mempromosikan pendidikan dan pengguruan tinggi Indinesia di Timor-Leste dan memperkuat akademik antar negara (Jabar, 2024). Penelitian tentang strategi hubungan alumni di berbagai program beasiswa menunjukkan bahwa keterlibatan alumni mampu meningkatkan *soft diplomacy* dan memperkuat hubungan bilateral (Rosadi et al., 2025).

Berdasarkan beberapa hambatan yang disebut di atas, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi diplomatik KBRI Dili yang digunakan dalam mempromsikan atau menyampaikan *soft diplomacy* melalui program pendidikan. Peneliti juga akan mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dalam menyebar luaskan informasi tentang program pendidikan tepat pada sasaran. Tantangan yang dihadapi dalam komunikasi dan sejauh mana program ini berdampak terkait hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste (Sacramento et al., 2024). Dengan adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan strategi komunikasi diplomatik tersebut maka peneliti dapat memberikan rekomendasi strategi komunikasi yang baik kepada KBRI agar menyampaikan informasi program pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat Timor-Leste terhadap program pendidikan tersebut. Peneliti juga diharapkan memberi pemahaman akademik tentang fungsi pendidikan dalam *soft diplomacy* dan pendekatan pendidikan berbasis komunikasi (Abdul et al., 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi dalam aktivitas diplomatik yang diterapkan oleh KBRI Dili dalam menyampaikan program pendidikan bagi masyarakat Timor-Leste?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi dalam aktivitas diplomatik KBRI Dili dalam melaksanakan program pendidikan di Timor-Leste.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan kontribusi terhadap teori dalam bidang ilmu komunikasi. Penelitian ini juga menjadi referensi akademik mengenai studi strategi komunikasi dalam meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi komunikasi diplomatik dalam promosi program pendidikan. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi program serta memberikan solusi untuk mengatasinya. Membantu calon penerima beasiswa dalam memahami proses pendaftaran dan persiapan studi di Indonesia.